BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Berdasarkan undang-undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Menurut Kementrian Bidang Kesejahteraan tahun 2004 orang yang berkerja namun belum memenuhi kebutuhan pokoknya disebut juga sebagai orang miskin.

Dengan demikian kemiskinan adalah mereka yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak adanya kemampuan dalam proses pembangunan, disebabkan karena tidak

memiliki kemampuan dalam pemilihan faktor produksi juga karena tidak memiliki kualitas produsksi yang memadai.[1]

Karena itu dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang membahayakan jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Dengan hidup miskin, seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama secara maksimal, tidak dapat mengecap pendidikan yang baik, dan akses kehidupan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu, maupun ekonomi (kesejahteraan), sebagaimana Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (Q.S An-Nisa' ; 9)[2]

Menurut Ibnu Katsir, keturunan yang lemah identik dengan kondisi kekurangan harta hal itu diperkuat dengan penjelasannya mengenai pesan Rasulullah kepada Sa'ad Abi Waqash untuk

[1] Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 78
[2] Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama , *Alqur'an dan Terjemah,...* h. 78

meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan.[3] Karena itu isu tentang kemiskinan tidak bisa diabaikan begitu saja dalam konteks kekeinian.

Menurut ravallion dalam bukunya Lincion Arsyad[4] kemiskinan adalah mereka yang kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, jika sakit tidak punya biaya untuk berobat. Umumnya orang miskin tidak dapat membaca karena tingkat sekelohnya rendah, tidak punya pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Artinya kemiskinan adalah ketidak berdayaan, termarjinalkan, dan tidak memiliki rasa bebas.

Jadi dilihat dari definisinya kemiskinan dapat disimpulkan sebagai tingkat standar hidup yang rendah, yaitu mereka yang kekurangan materi dibandingkan dengan standar yang umum dimasyarakat sekitarnya. Kebutuhan dasar itu seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan.[5]

---

[3]Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No 2 (2018), h. 217.

[4] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010) h. 299

[5] Prathama & Mandala, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI, 2006) h. 294

2. Penyebab Kemiskinan

Setidaknya ada tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu :

a) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Biasanya penduduk miskin memiliki sumberdaya terbatas.
b) Kemiskinan terjadi karena akibat dari perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Jika sumberdaya rendah maka produktivitasnya rendah
c) Kemiskinan muncul karena tidak adanya akses modal, sebagaimana menurut nurkse dalam teori lingkaran kemiskinan.

3. Ukuran Kemiskinan

Masalah kemiskinan sangatlah kompleks disetiap negara ukurannya bisa berbeda-beda, namun secara umum kemiskinan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kemikinan absolut dan kemiskinan relatif.

a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah pembanding antara tingkat pendapatan dengan kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum adalah ukuranuntuk mengukur garis kemiskinan. Seperti

makanan, pakaian, dan perumahan hal dasar untuk menjamin keberlangsungan hidup.

Kesulitan dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidakhanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh tingkat kemajuan suatu negara ,dan berbagai faktor ekonomi lainnya.

b) Kemiskian Relatif

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakatnya berubah. Konsep ini merupakan perbaikandari konsep kemiskinan absolut, dan karena konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, maka kemiskinan akan selalu ada.

Pada konsep ini kemiskinan akan selalu ada disebabkan karena keadaan masyarakat disekitar, sebab walaupun seseorang telah dapatmemenuhi kebutuhan dasarnya tapi masih jauh rendah dibanding dengan keadaan disekitarnya maka orang tersebut masih dianggap miskin.

4. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan ada banya macamnya, yaitu: tingkat konsumsi beras, tingakat pendapatan, tingkat kecukupan gizi,kebutuhan fisik minimum dan tingakat kesejahteraan.

a) Beras Tingkat Konsumsi

Sajogyo menggunakan tingkat konsumsi beras perkapita sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah perdesaan, penduduk dengan konsumsiberas kurang dari 240 kg perkapita pertahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg perkapita pertahun.

b) Tingkat Pendapatan

BPS tahun 2008 menetapkan garis kemiskinan (kapita/bulan) perdesaan di Jawa Barat sebesar Rp.155.367, - sedangkan di perkotaan sebesar Rp. 190.824, .-Perbedaan ini terjadi karena harga-harga kebutuhan dasar minimum di perdesaan yang relatif lebih kecil daripada di perkotaan.

c) Tingkat Kesejahteraan Sosial

Selain pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan yang lain yang sering digunakan. Pada publikasi UN yangberjudul International Definition and Measurement of levels of living: An Interim Guide disarankan9

komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

B. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Untuk dapat memahami alam semesta manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan manusia tidak akan dapat memahami kehidupan dengan baik sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. sehubungan dengan itu Allah SWT menyuruh makhluknya untuk senantiasa membaca sebagaimana firman-NYA dalam qur'an Surat Al'alaq ayat 1-5 yang berbunyi :

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢
ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا
لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Mahamulia, 4. yang mengajar (manusia) dengan pena, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.(Q.S Al-'Alaq : 1-5)[6]

[6] Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama , *Alqur'an dan Terjemah,...* h. 597.

Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup, bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.[7]

Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara[8].

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan

---

[7] Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal.23-24

[8] *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS* (Bandung: Citra Umbara. 2006), 72

mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.[9]

2. Pungsi dan Tujuan Pendidikan

a. Fungsi Pendidikan

dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di kemukakanbahwa fungsi pendidikan yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

b. Tujuan Pendidikan

Danim menjelaskan secara akademik, pendidikan memiliki beberapa tujuan. Yaitu : 1) Mengoptimalisai potensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki oleh siswa. 2) Untuk mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi kegenerasi. 3) Untuk mengembangkan daya adaptabilitas siswa untuk selalu siap

[9] Muhammad Irham, et. all., *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses* Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal 19.

menghadapi masadepan yang selalu berubah-ubah.Untuk mengebangkan nalar kritis siswa sehingga mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Seperti yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi yang ada dalam diri manusia sehingga dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan baik, akhirnya mampu bersaing dan bisa menjawab tantangan masa depan.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (dengan asumsi pada saat berusia 15 tahun proses pendidikan seseorang sudah berakkhir. Indikator ini merupakan penghitungan dari kombinasi angka partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang pernah dimiliki dan tingkat /kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

C. PDRB per Kapita

1. Pengertian PDRB

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian suatu wilayah. PDRB terbagi atas dua jenis yaitu PDRB atas harga konstan dan PDRB atas harga berlaku. PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar sedangkan PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun.

Produk Domestik Regional Brutto mencirikan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya alam mapun sumber daya manusia, dengan begitu akan tercipta besaran nilai hasil pendapatan perekonomian. PDRB per kapita adalah besaran nilai PDRB harga konstan dibagi jumlah penduduk dalam satu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke

tahun,[10] sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi dan peningkatkan pendapatan yang tinggi tidak dilarang bahkan hal demikian sangat dianjurkan selama tidak tenggelam dalam buaian hawa nafsu yang membuat lupa kepada Allah. Karena hal demikian adalah indikator dalam ketersediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun perlu diingat bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi disaat bersamaan mengharuskan terjadinya distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Hasyr : 7 berikut ini :

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا
يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ ٧

Harta rampasan fai'[11] *yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang bersal) dari penduduk beberapa negri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-*

---

[10] Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi,Teori Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005) h. 56

[11] Harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian ganimah. Ganimah ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. Pembagian fai seperti yang tersebut pada ayat 7, sedang pembagian ghonimah tersebut pada ayat 41 surah Al-Anfal.

> *orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S. Al-Hasyr:7)*[12]

Dalam kandungan ayat tersebut ditegaskan bahwa kekayaan yang dimiliki tidak boleh hanya dinikmati oleh segilintir orang saja. Pemerataan dalam distribusi kekayaan menjadi sebuah keharusan. Jika masyarakat mengalami kesenjangan yang tinggi, maka negara wajib mewujudkan konsep keseimbangan dalam masyarakat khususnya dalam pendistribusian kekayaan.[13]

Karena menurut Todaro[14] bahwa cara yang baik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningakatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga mampu melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian pendapatan per kapita akan meningkat secara otomatis, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan.

---

[12] Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama , *Alqur'an dan Terjemah,...* h. 546.

[13] Huda, Nurul, dkk. "Ekonomi Pembangunan Islam", (Jakarta: Premadei Group, 2015) h. 29

[14] Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga. 2000) h. 55

2. Penyusunan dan Penyajian PDRB

Penyusunan PDRB dapat dibetuk dengan cara tiga pendekatan, antara lain adalah :

a. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh dari berbagai unit produksi suatu wilayah atau daerah atau provinsi dalam jangka satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 sektor atau lapangan usaha antara lain yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Adm. Pemerintah, Pertahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud

adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua itu sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB dari semua komponen permintaan akhir terdiri atas: Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba (tidak mencari untung); Pengeluaran konsumsi pemerintah; Pembentukan modal tetap domestik bruto; Perubahan inventori; Ekspor netto.

3. PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Brutto mencirikan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya alam mapun sumber daya manusia, dengan begitu akan tercipta besaran nilai hasil pendapatan perekonomian. PDRB per kapita adalah besaran nilai PDRB harga konstan dibagi jumlah penduduk dalam satu wilayah.

D. Pengangguran

1. Definisi Pengangguran

Islam tidak membenarkan ummatnya untuk menganggur bahkan dalam Islam Bekerja diwajibkan dalam rangka untuk

memenuhi kebutuhan hidup, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah : 105 Sebagai berikut :

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah :105)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran adalah penduduk yang tidak bekrja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Secara umum pengertian pengangguran adalah orang yang belum memiliki pekerjaan tetap atau angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan.

"Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan" (Samuelson, 2004:362).

Menurut BPS yang disebut angkata kerja dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Bekerja yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
b. Pengangguran yaitu seseorang yang berhenti bekerja sementara atau sedang mencari pekerjaan.
c. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Jadi defnisi pengagguran adalah adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja namun tidak mendapatkannya. Sedangkan yang tidak mencari kerja, seperti sedang sekolah atau mengurus keluarga tidak masuk angkatah kerja.

> *Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang bekerja dan sedang mencari kerja, sedangkan yang tidak mencari kerja, entah karena harus mengurus keluarga atau sekolah, tidak masuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja*

yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan.[15]

2. Jenis-jenis Pengangguran

Jenis - jenis pengangguran diklasifikasikan dengan banyak dasar, antara lain[16]:

a. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

Pertama pengangguran alamiah, Pengangguran ini adalah pengangguran yang terjadi saat tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen inilah yang dinamakan pengangguran alamiah.

Kedua pengangguran friksional, Pengangguran ini disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya. *Ketiga* pengangguran struktural, Pengangguran ini disebabkan oleh beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan.

---

[15] Prathama Rarardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi & Makroekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008) h. 376

[16] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) h. 475-477.

Dan yang *ke-empat* Pengangguran konjungtur, Pengangguran ini adalah pengangguran yang terjadi karena pembengkakan dari pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran konjungtur berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

b. Pengangguran berdasarkan cirinya :

Pertama, pengangguran terbuka, Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Kedua, pengangguran tersembunyi, Pengangguran ini adalah istilah yang digunakan ketika suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan. *Ketiga,* pengangguran musiman, pengangguran ini

terjadi pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

Dan yang *ke-empat,* Setengah menganggur, Keadaan ini terjadi ketika seorang bekerja di bawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik, di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam golongan setengah menganggur.

3. Dampak Pengangguran

Pengangguran akan menghilangkan mata pencaharian dan pendapatan. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya.

> *Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum jika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat tercapai. Pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai.*[17]

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik

[17] Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) h. 69

dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang.[18]

E. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan

Menurut teori Nurkse bahwa kemiskian bertumpu pada keterbelakangan sumberdaya manusia, karena keterbelakangan sumberdaya manusia menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah menyebabkan pendapatan menjadi rendah. Dan jika pendapatan rendah maka kemiskinan akan terjadi.[19]

Menurut Todaro pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang sangat paling mendasar. Karena pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam penyerapan teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan[20]

Dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup

---

[18] Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan ..., h. 89

[19] udrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 1997) h. 107

[20] Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta :Erlangga. 2000)

uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas. Sehingga tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan.

2. Hubungan PDRB per Kapita dengan Kemiskinan

PDRB per kapita menjadi salah satu indikator sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa saja yang telah menikmati hasilnya. Semakin tinggi pendapatan per kapita maka semakin rendah tingkat kemiskinan.[21] PDRB per kapita juga dapat menunjukkan pengukuran jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan PDRB per kapita merupakan tolok ukur ekonomis yang paling sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis suatu bangsa.[22] PDRB per kapita menunjukkan pendapatan per kapita yang diterima oleh masyarakat.

Peningkatan Produk dari setiap sektor perekonomian masyarakat akan berdampak baik pada pembangunan manusia karena pendapatan yang dihasilkan dalam setiap sektor juga bertambah. Semakin tinggi PDRB yang diperoleh maka mencerminkan bertambahnya kualitas produktifitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara maksimal.

---

[21] Tambunan, Tulus. 2003. “Perekonomian Indonesia”.(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) h.187

[22] Todaro, Michael P, “Pembangunan Ekonomi”, Jakarta : Erlangga, 2000) h. 16

3. Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan

Sebab menganggur akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menggantungkan hidupnya pada orang-orang yang berproduktif sehingga menjadikan angka ketergantungan meningkat dan merosotnya pendapatan per kapita. Salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat akan mencapai maksimum jika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Dengan menganggur, sumber daya menjadi terbuang percuma. Tidak hanya produktivitas yang menurun, pendapatan masyarakat juga akan berkurang sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Tentu bahwa dalam laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin tidak hanya diukur dari pendapatan atau ekonomi saja tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingginya jumlah pengangguran yang berakibat pada munculnya kemiskinan. Sebagian besar anggota kelompok miskin adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan teratur atau yang hanya bekerja secara musiman.[23]

[23] Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi*..., h.260

F. Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai tafsiran yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang akan diuji kebenarannya. Setelah adanya kerangka pemikiran sebelumnya, maka penelitian ini dapat dibuat hipotesis secara parsial dan simultan sebagai berikut:

1. Diduga pendidikan berpengaruh negatif (tidak searah) dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
2. Diduga PDRB per Kapita berpengaruh negatif (tidak searah) terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten dan kota Provinsi Banten.
3. Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengruh posistif (searah) terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
4. Diduga secara bersama-sama (simultan) varibel Pendidikan, PDRB per Kapita, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten.